



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIC INDONESIA

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 30 September 2014 No. 78

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

**BIDANG : BUMN/BUMD**

**LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Ir. BUDI NOVIANTORO
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT - DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN
3. NHK : 89830
4. Alamat Kantor : Jl. JEND. AHMAD YANI NO. 541, PALEMBANG
5. Tanggal Pelaporan : 30 Juni 2009, 28 Desember 2010

**Status Laporan**

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	30 Juni 2009	28 Desember 2010
	Rp. 1.381.500.000	Rp. 1.381.500.000
1. Tanah & Bangunan seluas 174 m2 & 160 m2, di Kabupaten BĀNDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1993 sampai dengan 1995	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000
2. Tanah & Bangunan seluas 189 m2 & 120 m2, di Kota SURABAYA, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1999	Rp. 403.500.000	Rp. 403.500.000

	30 Juni 2009	28 Desember 2010
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA</b>	Rp. 67.446.298	Rp. 209.242.378
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 67.446.298	Rp. 209.242.378
<b>E. PIUTANG</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	Rp. 1.722.846.298	Rp. 2.044.642.378
<b>III. HUTANG</b>	-----	-----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )</b>	Rp. 1.722.846.298	Rp. 2.044.642.378

Jakarta, 1 September 2014

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
DEPUTI

DIREKTORAT PENDAFTARAN  
DAN PEMERIKSAAN LHKPN  
DIREKTUR

TTD  
ISWAN ELMI

TTD  
CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.